

Peran Komunikator Politik dalam Membentuk Kepemimpinan Era Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

**Ahmad Sampuna¹, M.Fadhli², Dona Dwi Novita³, Mansyursyah⁴,
Angga Purnama⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan

e-mail: ahmadsampurna@uinsu.ac.id¹, fadhlipulungan02@gmail.com²,
donaduwi56@gmail.com³, mansyurmargolang45@gmail.com⁴,
anggamenra2@gmail.com⁵

Abstrak

Komunikator politik memiliki peran krusial dalam menyampaikan pesan-pesan politik dan membangun citra pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Model komunikasi interaksional menjadi landasan teoritis untuk memahami bagaimana pesan saling dipertukarkan dan makna bersama terbentuk melalui proses komunikasi yang dinamis dan interaktif. Komunikator politik memiliki kekuatan untuk menentukan persepsi dan pendapat masyarakat mengenai kepemimpinan Gus Dur. Selain itu, komunikator politik juga memiliki tugas untuk mengatur dan mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa komunikator politik memiliki peran penting dalam mengatur dan mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat, serta membantu kepemimpinan Gus Dur dalam mengatur dan mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam era kepemimpinan Gus Dur, komunikasi politik melalui dagelan juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta dalam membawa suasana perubahan politik. Tantangan yang dihadapi oleh komunikator politik meliputi konflik dengan kelompok masyarakat, keputusan kontroversial, dan tekanan dari berbagai pihak. Namun, keberhasilan dalam membentuk opini publik juga dapat dicapai melalui strategi komunikasi yang efektif dan penggunaan media yang tepat. Kajian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas proses komunikasi politik pada masa kepemimpinan Gus Dur dan relevansinya dalam konteks politik modern.

Kata Kunci: *Komunikasi, Politik, Gusdur, Kepemimpinan.*

Abstract

Political communicators have a crucial role in delivering political messages and building the image of leaders based on national values. The interactional communication model is the theoretical basis for understanding how messages are exchanged and shared meanings are formed through a dynamic and interactive communication process. Political communicators have the power to determine people's perceptions and opinions about Gus Dur's leadership. In addition, political communicators also have the task of organizing and regulating the information needed by the community. This study shows that political communicators have an important role in organizing and managing the information needed by the community, as well as assisting Gus Dur's leadership in organizing and managing the information needed by the community. In the era of Gus Dur's leadership, political communication through dagelan also had an important role in regulating the relationship between the ruler and the people, as well as in bringing about an atmosphere of political change. Challenges faced by political communicators include conflicts with community groups, controversial decisions, and pressure from various parties. However, success in shaping public opinion can also be

achieved through effective communication strategies and the use of appropriate media. This study provides insight into the complexity of the political communication process during Gus Dur's leadership and its relevance in the modern political context.

Keywords: *Communication, Politics, Gusdur, Leadership.*

PENDAHULUAN

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dikenal Gus Dur merupakan seorang santri ningrat dari garis keturunan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Selain karena kakeknya yang dikenal luas sebagai salah satu pendiri organisasi keagamaan Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sendiri sebetulnya sudah dikenal sebagai agamawan (ulama), tokoh gerakan Islam Indonesia, dan politisi yang menjadi presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999-2001 (Barton.G, 2002).

Gus Dur adalah presiden yang menjabat di masa transisi pasca runtuhnya orde baru, selain itu Gus Dur juga memiliki latar belakang sebagai seorang kyai dan berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, hal tersebut berpengaruh pada cara Gus Dur berkomunikasi baik dengan staf, anggota kabinet, kepala Negara, sahabat, parlemen bahkan sampai dengan masyarakat, komunikasi Gus Dur tersebut dijalin dengan menyelipkan humor untuk mempermudah pesan yang ingin Gus Dur sampaikan dipahami oleh lawan bicaranya.

Komunikasi politik adalah suatu proses interaktif tentang transmisi dari informasi di antara para politikus, media dan publik. Pada prosesnya bergerak ke arah bawah dari institusi pemerintah kepada masyarakat, secara horizontal dalam hubungan antar aktor-aktor politik dan juga bergerak ke atas yaitu dari opini publik ke pihak otoritas (Norris, 2004)

Komunikasi politik bukan bidang yang berdiri sendiri. Komunikasi politik terdiri dari disiplin ilmu politik dan ilmu komunikasi (Soukup, 2014). Beberapa ahli menjelaskan mengenai komunikasi politik. Kata kunci dalam komunikasi politik adalah pesan yang disampaikan mempunyai dampak politik yang besar bagi orang, kelompok, pola pikir, lembaga, dan masyarakat secara luas dalam daerah tertentu (Graber dan Smith, 2015). Komunikasi politik adalah suatu proses interaktif tentang transmisi dari informasi di antara para politikus, media dan public (Norris, 2004)

Peran komunikator politik merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kepemimpinan, terutama dalam pembahasan jurnal ini yaitu di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam jurnal ini, Penulis akan membahas kajian tentang peran komunikator politik dalam membentuk kepemimpinan era kepemimpinan Gus Dur. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunikator politik dalam membentuk kepemimpinan era Gus Dur.

Abdurrahman Wahid merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama dalam masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia dari 1999 hingga 2001. Gus Dur merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh dalam menyusun visi dan misi pemerintahannya, yang terdiri dari empat prioritas utama, yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan pemulihan ekonomi.
2. Pemulihan keamanan dan pengurusan konflik.
3. Pembangunan politik dan pemulihan demokrasi.
4. Pembangunan sosial dan pemulihan kehidupan masyarakat

Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana komunikator politik Gus Dur menggunakan media massa untuk mengkomunikasikan visi dan misi pemerintahannya kepada masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespon terhadap komunikasi tersebut. Kajian ini diperlukan karena peran komunikator politik dalam membentuk kepemimpinan sangat penting.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, yakni dengan pendekatan analisis isi dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data

menggunakan buku-buku, jurnal dan internet. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari fenomena yang saat ini sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Gus Dur

Sosok Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur merupakan figur yang fenomenal dalam sosial politik masyarakat Indonesia. Gus Dur adalah cucu pendiri NU (K.H. Hasjim Asj'ari) dan putra K.H. Wahid Hasjim (tokoh NU dan Menteri Agama di tahun 1960-an). Kehadirannya dikancah dunia perpolitikan Indonesia telah membawa suasana yang cukup dinamis dan segar. Hingga tidak diherankan jika pada eranya dia menjadi buruan para wartawan untuk diminta pendapat dan komentarnya, sasaran kritik para kritisi yang selalu mengkritik dan menyangkal pendapatnya, sekaligus tumpuan dan tempat perlindungan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan baik secara politik, ekonomi maupun kelompok minoritas lainnya yang merasa terancam keberadaannya.

Gagasan-gagasannya yang segar dan pikiran-pikirannya yang jauh terkadang membuat masyarakat sulit mengikuti dan memahaminya. Demikian pula perilakunya yang melampaui kelaziman ditinjau dari posisinya sebagai seorang kiai dan tokoh masyarakat yang mempunyai subkultural tersendiri karena menjadi panutan membuat berbagai kalangan mengkhawatirkan dirinya, namun banyak juga yang menentangnya.

Hingga tidak berlebihan kiranya kalau Gus Dur telah menjadi “destroyer” yang membahayakan sekaligus “reformer” yang menajikan harapan dan tumpuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia. (Zastrow, 1999). Ketokohan dan kepemimpinan seseorang memegang peranan penting dalam organisasi politik. Sudah lama Gus Dur menjabat ketua umum PBNU. Sebelum menjadi deklarator PKB, Gus Dur telah dikenal luas oleh masyarakat baik sebagai sosok intelektual dan tokoh nasional. Bahkan ia juga dikenal di luar negeri dan berpartisipasi dalam berbagai diskusi, seminar, konferensi dan organisasi internasional. (Ismail, 1999)

Salah satu ciri yang menandai pemikiran Seorang Gusdur adalah “komitmennya pada pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi”. Selain itu, nilai-nilai pluralistik ini telah “dirajut ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri, karena alasan-alasan inilah Barton berkesimpulan bahwa Abdurrahman Wahid dan neomodernis muslim lainnya “berada dalam barisan depan pembaharuan demokratis.

Penafsiran Abdurrahman Wahid dan rujukannya yang sering pada Pancasila erat kaitannya dengan peranannya sebagai eksponen terkemuka Islam neomodernis dan pluralisme dan demokratik. Telah lama ia berpendapat bahwa umat harus berpegang pada Pancasila. Ia memahami Pancasila sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional. Posisi ini sangat berseberanangan dengan kalangan “modernis” yang berusaha “mengislamkan” Indonesia. (Greg Fealy, 2010)

2. Model Komunikasi Gus Dur dalam memimpin

a) Model Interaksional

Model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang memiliki kesamaan dengan model komunikasi transaksional karena keduanya merupakan model komunikasi dua arah. Namun, model komunikasi interaksional sebagian besar digunakan untuk media baru atau new media seperti internet. Salah satu model komunikasi yang termasuk model komunikasi interaksional adalah model komunikasi Schramm. Model komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses dimana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis (Schramm, 1997). Model komunikasi interaksional terdapat unsur umpan balik yang membuat proses komunikasi menjadi lebih interaktif karena berlangsung secara dua arah.

Model komunikasi pertama yang dominan dipraktikan Gus Dur adalah model interaksional. Model ini menempatkan diri komunikator dalam posisi sejajar dengan

komunikator lain sehingga terjadi interplay yang demokratis dalam kuadran komunikasi saling memberi dan menerima. Dia tidak alergi untuk bertemu banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang atau kekuatan politik yang pernah bersebrangan dengannya.

Sikap politik Gus Dur yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Pada pemilu 2004 saat dirinya tidak lolos menjadi calon presiden akibat persyaratan yang dibuat oleh KPU, Gus Dur memilih untuk golput secara bersamaan dia juga merestui pasangan Wiranto-Solahuddin untuk didukung kaum Nahdliyin. Dengan tegas Gus Dur menyatakan tidak akan bekerjasama dengan Megawati karena dianggap telah melakukan kesalahan konstitusional.

Namun, Gus Dur melakukan hal yang tak terduga setelah pilpres putaran pertama yang berlangsung 5 Juli 2004 menempatkan SBY-JK dan Megawati-Hasyim sebagai pasangan kandidat yang akan maju ke putaran ke dua. Gus Dur telah sukses mengkomunikasikan ajaran islam damai dan rahmat bagi semesta alam dalam sebuah pemahaman bersama (mutual understanding) melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Di tengah menguatnya radikalisme atas nama agama termasuk jaringan terorisme yang kian aktual di Indonesia dan dunia, Gus Dur tidak bosan-bosannya memerankan diri sebagai pembawa pesan bahwa inkluvisme islam adalah keharusan.

b) Komunikasi Transaksional

Model komunikasi transaksional Komunikasi dalam bentuk transaksional atau komunikasi dipahami dalam konteks hubungan (relationship) antara dua orang atau lebih dengan kata lain bahwa semua perilaku adalah komunikatif semua bisa dikomunikasikan. Berdasarkan pengertian komunikasi dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian lambang, pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media atau secara langsung, sehingga menimbulkan beberapa efek atau umpan balik.

Gus Dur adalah satu diantara aktor politik yang banyak memberi pelajaran berharga mengenai bagaimana seharusnya kita menegosiasikan ide, gagasan, pemikiran dan tindakan sosial politik kita di tengah lingkungan yang kian kompetitif. Gus Dur kerap membuka diskursus di media massa tentang banyak hal, termasuk yang oleh sebagian orang dianggap sebagai isu sensitif. Bagi Gus Dur mengkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu yang dianggap menyeleweng adalah hal yang lumrah, meski terhadap kelompok mayoritas sekalipun. Hal tersebut merupakan kegigihan Gus Dur memperjuangkan demokratisasi meski harus berhadapan dengan tembok kekuasaan Orde Baru. Melalui berbagai ceramah, tulisan, sentilan joke dan lain-lain Gus Dur menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan Soeharto.

Secara umum ada dua kecenderungan komunikasi yang dilakukan Gus Dur dalam mengimplementasikan model transaksional ini. Pertama, kebiasaan Gus Dur memproduksi pesan politik yang mengharuskan penerima pesan mengurai sendiri substansi maknanya. Komunikan harus menduga dan memberi tafsir, daripada menangkap penjelasan maknanya secara langsung. Misalnya, beberapa tahun lalu Gus Dur menyebut inisial seseorang sebagai dalang dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Kedua, kebiasaan Gus Dur untuk membawa ranah perdebatan pada topik-topik kebijakan kontroversial. Misalnya, saat Gus Dur melindungi Ahmadiyah berbagai cercaan dan perdebatan mengemuka di berbagai kesempatan Gus Dur justru tampil konsisten dan berani berdebat mengapa kelompok Ahmadiyah layak dia bela.

Hingga saat ini masih banyak orang yang tidak bisa menangkap metakomunikasi dari pesan yang disampaikan dan diartikulasikan oleh Gus Dur sehingga bagi yang tak mengenal sosok Gus Dur secara baik akan muncul asumsi bahwa dia adalah simbol ketidak konsistenan. Gus Dur identik dengan gaya

komunikasi verbal agresif. Hal ini bisa diamati dari kebiasaan Gus Dur adalah sebuah fenomena tokoh dengan sejuta makna dari komunikasi politik yang telah dicatatkannya dalam perjalanan negeri ini. Giliran kita memaknai fenomena tersebut hingga kita memahami substansi pesan di balik komunikasi yang telah disumbangkan Gus Dur untuk rakyat negeri ini.

3. Peran Komunikator Politik Gus Dur

Akar pemikiran politik K.H Abdurrahman Wahid sebenarnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan (humanism-insaniyah) dalam Islam. Menurut pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan politik umat Islam di dalam masyarakat Indonesia. Komitmen kemanusiaan merupakan menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (Abdurrahman, 2019). Menurut Gus Dur, komitmen kemanusiaan dapat menjadi dasar keberadaan politik Islam di Indonesia.

Dilahirkan dalam lingkungan keluarga muslim terpandang, sebab kedua kakeknya merupakan pemuka agama yang terkenal dan dianggap sebagai pemimpin para ulama serta aktif dalam pergerakan nasionalis Indonesia. Kakek Gus Dur Hasyim Asyari merupakan orang yang mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur juga ikut berperan dalam memajukan NU. Dari sini sudah terlihat bahwa latar belakang Gus Dur bukanlah dari politik melainkan tokoh agama. Kehidupan politik Gus Dur dimulai setelah dirinya pulang dari luar negeri setelah tujuh tahun. Dirinya ditunjuk sebagai sekretaris umum di pondok pesantren Tebuireng. Disamping itu dirinya juga menjabat sebagai jurnalis di beberapa surat kabar, majalah, dan jurnal. Pada berita yang ditulis Gus Dur mengembangkan gabungan bahasa antara bahasa harian dan humor namun dengan topik yang serius.

Pada periode yang sama beliau sudah mulai terlibat dalam kepengurusan NU yang didirikan oleh kakeknya. Awal tahun 1980 Gusdur menjadi Sekretaris Syuriah PBNU, saat menjabat beliau terlibat dalam diskusi serta perdebatan mengenai masalah agama, sosial, dan politik. Saat itu pemerintah masih takut akan sikap oposisi dari organisasi tersebut. Hal ini mengakibatkan hubungan antara NU dan pemerintah menjadi renggang. Namun pada akhirnya Gus Dur berhasil memperbaiki masalah tersebut dan hubungan antara NU dan pemerintah mulai menjadi baik.

Pada awal reformasi Gus Dur memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dunia politik. Lalu dirinya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tujuan dibentuknya PKB adalah sebagai wadah Nahdhiyin, walaupun partai ini terbuka untuk semua kalangan. Peran Gus Dur dalam perpolitikan di PKB sangatlah besar, bisa dikatakan jika PKB tanpa adanya Gus Dur, maka partai tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Gus Dur sangat berkontribusi dalam menciptakan visi, misi, dan perilaku politik dari PKB. Hingga tak heran setelah partai ini didirikan pada tahun 1998 banyak dari anggota partai menginginkan agar Gus Dur menjadi presiden atau setidaknya memiliki kesempatan untuk mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden. Setelah diadakannya pemilihan presiden pada 20 Oktober 1999 di gedung DPR-MPR, Gus Dur terpilih menjadi presiden ke-empat dengan perolehan 373 suara.

Hal pertama yang dilakukan Gusdur setelah menjabat sebagai presiden adalah membubarkan Departemen Penerangan, yang merupakan senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Dengan dibubarkannya departemen tersebut maka kebebasan dalam pers di Indonesia diharapkan semakin terjamin. Walaupun kekuasaannya tidak sampai akhir masa jabatannya, dengan segala sepak terjangnya di dunia politik yang sering dianggap “nyeleneh” dan kontroversial, Gus Dur menjadi sosok tokoh agama yang telah berperan dalam panggung politik yang berperan sebagai aktor kritis terhadap negara, menjadikan beliau sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik paling independen di Indonesia.

Gus Dur merupakan orang yang humoris. Namun humor yang diucapkan beliau memiliki makna yang sangat luar biasa, dan humor tersebut hanya akan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Humor yang diucapkan Gus Dur didasari oleh ijtihad. Karena

beliau tidak memandang manusia, jabatan, harta, ataupun wanita. Namun hanya kepada keridhaan Allah lah beliau memandang. Humor yang diucapkan Gus Dur digunakan sebagai alat komunikasi politik. Hal ini berarti humor digunakan untuk berinteraksi antar sesama manusia sebagai strategi politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hidayatullah, 2018). Contoh humor yang diucapkan Gus Dur adalah saat menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Mahfud dirinya hampir menolak penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan. Alasannya adalah karena dirinya tidak memiliki latar belakang dibidang pertahanan,

TNI atau Polri. Namun ketika Mahfud mengutarakan hal tersebut, Gus Dur menjawab dengan sangat cerdas, bahwa Pak Mahfud harus bisa, Gus Dur saja menjadi seorang presiden tidak perlu memiliki latar belakang presiden. Setelah mendengar jawaban Gus dur, Mahfud terdiam tidak berkutik. Menurutnya Gus Dur aneh karena memilihnya menjadi Menteri Pertahanan. Dalam humor yang dikatakan Gus Dur kepada Mahfud tersebut mengisyaratkan sekaligus menyadarkan Mahfud untuk tenang dalam berpikir dalam menghadapi permasalahan yang sedang atau akan terjadi. Jika permasalahan dihadapi dengan tenang dan santai maka akan terasa ringan dan tidak berat.

Contoh lainnya adalah ketika terjadinya kontroversi mengenai Negara Indonesia tetap menjadi kesatuan atau menjadi Negara federal. Menurut Amin Rais selaku perwakilan partai PAN berpendapat untuk menjadi Negara federal, karena menurutnya negara federal dapat menjadikan negara lebih demokratis jika diterapkan di negara Indonesia. Pendapat tersebut mendapat sanggahan dari Akbar Tandjung (Golkar) dan Megawati (PDIP) yang mengatakan jika menjadi negara federal akan merusak keutuhan dan persatuan bangsa dan negara. Tanggapan Gus Dur mengenai kontroversi tersebut negara federal baik karena menjamin negara menjadi lebih demokratis, sedangkan negara kesatuan menjamin keutuhan bangsa. Menurutnya keputusan yang dapat diambil adalah menggunakan “namanya tetap negara kesatuan, tetapi isinya pakai negara federal. Gitu aja kok repot,” kata Gus Dur. (Hidayatullah, 2018)

Periode singkat Gus Dur dalam pemerintahannya menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapinya saat dirinya menjabat sebagai presiden. Permasalahan negara yang tak pernah selesai serta mendapat banyak kritikan yang mendesaknya untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. Namun dibalik itu semua Gus Dur tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Dibawah ini akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang telah Gusdur lakukan saat beliau menjabat sebagai presiden :

Pertama, Pribumisasi Etnis Tionghoa merupakan kaum minoritas yang sering termarginalkan bahkan sampai mengalami ketertindasan. Awal diskriminasi terjadi adalah pada saat kolonial Belanda yang melarang keturunan Tionghoa memasuki Islam dan melarang bagi pribumi untuk menikahi etnis Tionghoa dengan alasan bahwa karena mereka takut jika masyarakat muslim dan Tionghoa bersatu dan bersama sehingga Belanda mengeluarkan aturan tersebut.

Akibat dari larangan tersebut, kelompok Tionghoa menjadi kelompok yang terkucilkan, dibenci oleh masyarakat lainnya. Diskriminasi tersebut berlanjut pada masa orde lama sampai orde baru. Hingga pada saat masa kepemimpinan Abdurrahman wahid, orang-orang Tionghoa yang berada di Nusantara juga memiliki hak yang sama seperti warga negara yang lain. Karena berada di negeri dan menjadi warga negara yang sama, sudah sepatutnya mereka juga dikenal sebagai penduduk asli Indonesia seperti masyarakat yang lain. Banyak usaha yang dilakukan Gus Dur untuk membela kaum minoritas, terutama etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Gus Dur memiliki peran yang besar terkait pembelaan terhadap kelompok Tionghoa, sehingga mulai pada 10 Maret 2004 kelompok keturunan Tionghoa wilayah Semarang kelenteng Tay Kek Sie menjadikan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Nusantara.

Kedua, Dekonsentrasi TNI dan POLRI Sebagai penjaga keamanan negara, Polri dan TNI adalah sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya TNI dan Polri merupakan dua sistem yang berbeda dan terpisah yang memiliki fungsinya masing-masing. TNI yang berfungsi sebagai alat dalam menjaga pertahanan negara sedangkan Polri adalah

alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada masa pemerintahan orde baru TNI dan POLRI dijadikan satu membentuk ABRI. Namun sejak reformasi pemerintahan tahun 1998 banyak dari berbagai pihak meminta agar Polri untuk memisahkan diri dari ABRI dengan harapan menjadi lembaga yang profesional dan mandiri. Kemudian pada masa pemerintahan Gus Dur menetapkan pada TAP MPR No.VI/2000 bahwa kemandirian Polri berada di bawah presiden langsung dan diharapkan menjadi polisi yang mandiri, bermanfaat, dan profesional.

Ketiga, Bidang ekonomi dalam mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, pemerintah membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang memiliki tugas memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belumpulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Presiden Gusdur mewarisi ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik dari pemerintahan Habibie, menghasilkan nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp700/US\$ dan indeks harga saham gabungan (IHSG) ada pada level 700.

Dalam konteks Abdurrahman Wahid, media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadapnya. Berikut beberapa aspek yang menyoroti peran media massa dalam membentuk opini dan persepsi tentang Gus Dur:

- a) Penyediaan Informasi: Media massa menyediakan informasi tentang kebijakan, tindakan, dan peristiwa yang melibatkan Gus Dur. Melalui pemberitaan yang intensif, media mengarahkan perhatian masyarakat kepada topik tertentu, memengaruhi persepsi tentang urgensi dan relevansi isu-isu tertentu.
- b) Pembentukan Agenda Publik: Media massa memilih isu-isu yang dianggap penting atau relevan untuk diperbincangkan oleh masyarakat. Dengan menekankan suatu isu, media membentuk bagian dari landasan opini publik.
- c) Pencetus Diskusi dan Debat: Melalui liputan dan analisis, media massa memicu diskusi dan debat tentang kebijakan dan kepemimpinan Gus Dur. Ini memengaruhi cara masyarakat memandang isu-isu tersebut.
- d) Pengawasan Terhadap Pemerintah dan Institusi: Media massa berperan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan institusi. Liputan investigatif dan kritik terhadap kebijakan memengaruhi persepsi publik tentang kinerja Gus Dur sebagai pemimpin.
- e) Pembentukan Sikap dan Perilaku: Berdasarkan informasi yang diterima dari media massa, masyarakat membentuk sikap dan perilaku terhadap Gus Dur. Media memengaruhi apa yang dipikirkan orang tentang kepemimpinan dan tindakan Gus Dur.
- f) Penedukasian Masyarakat: Media massa berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kebijakan dan peristiwa yang melibatkan Gus Dur. Informasi yang disampaikan memengaruhi pemahaman dan pengetahuan publik.
- g) Mendorong Partisipasi Publik: Melalui liputan dan kampanye, media massa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kepemimpinan. Ini memengaruhi persepsi tentang Gus Dur sebagai pemimpin yang memperhatikan aspirasi rakyat.
- h) Mendorong Kesadaran Multikultural: Media massa memainkan peran dalam memperkuat kesadaran multikultural dan menghormati keragaman. Liputan tentang Gus Dur sebagai pemimpin yang menghargai pluralisme memengaruhi persepsi publik.
- i) Mempromosikan Keterbukaan dan Transparansi: Media massa memperjuangkan keterbukaan dan transparansi dalam kepemimpinan. Liputan tentang transparansi kebijakan dan tindakan Gus Dur memengaruhi persepsi tentang integritasnya.
- j) Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik: Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Etika jurnalistik memengaruhi persepsi publik tentang kehandalan dan profesionalisme media.

Dengan demikian, peran media massa dalam membentuk persepsi publik tentang Gus Dur sangat kompleks dan memengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinannya.

4. Pro dan Kontra dalam kepemimpinan Gusdur

a) Bidang Politik

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin (Kemal, 2012). Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Departemen Koperasi dan Pengusaha. Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkannya kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak (Ishak, 2008).

Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Lawan politik KH. Abdurrahman Wahid menganggap kebijakan ini hanya kepentingan KH. Abdurrahman Wahid semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada titik ini Abdurahman Wahid mulai membuka hubungan langsung dengan Israel dan tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ke tidak setuju marak di seantero negeri. Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Presiden Abdurahman Wahid yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berkedudukan di Tel Aviv, langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstran.

Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang menyatakan menundanya, tetapi Abdurahman Wahid secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi.

Membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripadamembiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US\$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US\$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia (Ishak, 2008). Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto.

Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina yang selama kekuasaan Orba mengalami diskriminasi.

b) Bidang Ekonomi

Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim,

wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang.

Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen (Ishak, 2008).

Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan yang relatif rendah maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang Tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Kemudian naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.

Naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam menambah pemasukan keuangan Negara. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset- aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. namun sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Abdurrahman Wahid berhasil dilengserkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati (Ishak, 2008).

c) Bidang Militer

Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo A. S yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Pemilihan Laksamana Widodo A.S ini merupakan suatu dobrakan atas tradisi mengingat dari awal berdirinya organisasi militer di Indonesia, Angkatan Darat selalu menempati pucuk tertinggi. Di samping itu, ada lima kebijakan yang lain diambil oleh Abdurrahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi sipil (Muhaimin, 2008) , yaitu :

- 1) Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota.
- 2) Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolrilangsung berada di bawah komando Presiden.
- 3) Membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPPHAM) dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI.
- 4) Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer.

- 5) Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.
- d) Bidang Hukum

Ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, "Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing." Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri.

Ayat (1) berbunyi, "TNI adalah alat yang berperan dalam pertahanan Negara."

Ayat (2) berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan."

Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kepresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yan gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999 (Iskandar, 2004). Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden".Terdapat pula PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik. Terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang diduga terlibat kasus-kasus KKN di masa pemerintahannya. Maka pemerintahan Abdurrahman Wahid membuka kembali penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasannya, Dharmais, Supersemar dan Dakab, dimana Soeharto sebagai tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui PP No.15 tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978.

Penyalurannya disinyalir hanya kesejumlah kroninya saja. Dengan demikian, ada penyalahgunaan keuangan negara tidak kepada seluruh rakyat tetapi kepada beberapa orang saja, dan ini jelas melanggar ketentuan UU D1945 khususnya Pasal 33, yaitu pasal yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengaturberbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah melalui proses panjang, dan peradilan dijalankan tetapi Jaksa selaku penuntut umum tidak pernah bisa menghadirkan Soeharto di Pengadilan.

Sehingga pada putaran ketiga sidang pengadilan terhadap Soeharto, Hakim menetapkan bahwa kasus Soeharto tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa.Dengan demikian maka Abdurrahman Wahid pun gagal untuk mengadili Soeharto atas semua dugaan KKN yang beliau lakukan selama berkuasa (Iskandar, 2004). Abdurahman Wahid sendiri dimasa kekuasaannya diduga terlibat KKN yaitu kasus penyalahgunaan dana yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (bullogate), penyalah-gunaan dana bantuan Sultan Brunei (Bruneigate). DPR mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus Bullogate dan Bruneigate, yang akhirnya diterima DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam pada tanggal 5 September 2000 (Zaenuddin, 2008).

Setelah bekerja hampir lima bulan, Pansus merampungkan penyelidikannya dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada rapat Paripurna DPR pada tanggal

5 Januari 2001. Laporan tersebut, menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog, dan terdapat inkonsistensi pernyataan presiden tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, sehingga menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada masyarakat.

e) Bidang Sosial Budaya

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu:

- 1) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
- 2) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu : Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru, Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi, Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Abdurrahman Wahid, Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot, Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora (Efendi, 2002).

SIMPULAN

Komunikator politik di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki peran penting dalam menggambarkan gagasan, ideologi, dan visi kepemimpinan Gus Dur. Komunikator politik ini memiliki kekuatan untuk menentukan persepsi dan pendapat masyarakat mengenai kepemimpinan Gus Dur. Selain itu, komunikator politik juga memiliki tugas untuk mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Kajian ini menunjukkan bahwa komunikator politik memiliki peran penting dalam mengatur dan mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat, serta membantu kepemimpinan Gus Dur dalam mengatur dan mengatur informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan nasional, peran komunikator politik sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan politik dan membangun citra pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Komunikator politik harus memiliki pola komunikasi, strategi komunikasi, dan memilih media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh komunikator politik adalah kompleksitas proses komunikasi politik. Mereka harus menghadapi konflik, tekanan, dan tuntutan dari berbagai pihak. Selain itu, keputusan-keputusan kontroversial juga menjadi bagian dari tantangan dalam membangun kepemimpinan. Komunikator politik yang efektif dapat membentuk opini publik melalui pesan-pesan yang disampaikan. Dengan memilih strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan media, mereka dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang pemimpin dan kebijakan yang diambil. Peran komunikator politik dalam membentuk kepemimpinan pada era Gus Dur adalah krusial. Mereka memiliki tanggung jawab untuk

memastikan pesan-pesan politik sampai kepada khalayak dengan baik dan membangun citra pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton.G. (2002). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKis.
- Efendi, C. (2002). *PKB Politik Jalan Tengah Nu*. Jakarta: Pustaka Ciganjur. Greg Fealy, G. B.
- Hidayatullah, N. (2018). *Dagelan Politik Gusdur tahun 1999-2001*. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah.
- Ishak, R. (2008). *Catatan Hitam Presiden Indonesia*. Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci.
- Iskandar, M. (2004). *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*. Yogyakarta: LKis.
- Ismail, F. (1999). *Nu Gusdurisme dan Politik kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. \
- Kemal, A. (2012). *Spirit 5 Presiden RI*. Yogyakarta: Syura Media Utama.
- Muhaimin. (2008). *Bambu Runcing dan Mesiu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Norris. (2004). *Political Communication: Ensichlopedia Of the Social Science*.
- Soukup, S. J. (2014). *Political Communication. Communication Research Trends*.
- Zaenuddin. (2008). *Prospek gerakan Oposisi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rajawali Press.
- Zastrow, A. (1999). *Gus dur, Siapa sih sampeyan?* Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama.